SKRIPSI

PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA KARYA MANDIRI KECAMATAN HULU GURUNG KABUPATEN KAPUAS HULU

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Jurusan Ilmu Administrasi

Oleh:

Nurkhaliza

NIM. E1032221016

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

SKRIPSI

PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA KARYA MANDIRI KECAMATAN HULU GURUNG KABUPATEN KAPUAS HULU

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh:

Nurkhaliza

NIM. E1032221016

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA KARYA MANDIRI KECAMATAN HULU GURUNG KABUPATEN KAPUAS HULU

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Nurkhaliza

NIM E1032221016

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Pardi, S.Sos., M.AB Tanggal: 8-5-2026

NIP. 197209052002121003

Dosen Pembimbing Pendamping

Deni Darmawan, S.E., M.Si. Tanggal: 11-5-2026

NIP. 197306092007011001

LEMBAR PENGESAHAN

PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA KARYA MANDIRI KECAMATAN HULU GURUNG KABUPATEN KAPUAS HULU

Oleh:

Nurkhaliza

E1032221016

Dipertahankan di	: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Pada Hari/Tunggal	: Kamis, 11 Juni 2026
Waktu	: 15.00 WIB
Ruangan	: Ruang Seminar R-1

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Pardi, S.Sos., M.AB
NIP. 197209052002121003

Sekretaris

Doni Darmawan, S.E., M.Si.
NIP. 197306092007011001

Penguji Utama

Dr. Isdairi, M.Si.
NIP. 196402181990021001

Penguji Pendamping

Haunan Fachry Ronilie, S.I.P, M.A
NIP. 199003182019031010

Disahkan Oleh:

Dekan Fisip Untan

Dr. Herlan, S.Sos, M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga ekonomi desa yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan desa. Namun, pengelolaan BUMDes Karya Jaya di Desa Karya Mandiri, Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti pencatatan keuangan yang belum terstruktur, keterbukaan informasi yang terbatas, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan BUMDes Karya Jaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari Kepala Desa, Ketua BUMDes, Sekretaris BUMDes, dan masyarakat. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan BUMDes Karya Jaya telah dilaksanakan, namun belum optimal. Dari aspek akuntabilitas, pengurus telah menyusun laporan kegiatan dan laporan keuangan, tetapi pencatatan masih dilakukan secara sederhana, terdapat kredit macet pada unit usaha simpan pinjam, serta pengelolaan usaha LPG 3 kg belum didukung dokumen perjanjian yang jelas. Dari aspek transparansi, informasi mengenai pengelolaan dan perkembangan usaha belum disampaikan secara rutin kepada masyarakat. Dari aspek partisipasi, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan masih terbatas. Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan peningkatan tata kelola BUMDes agar lebih akuntabel, transparan, partisipatif, serta mampu mendukung keberlanjutan usaha dan kesejahteraan masyarakat desa.

Kata Kunci: Good Governance, Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Badan Usaha Milik Desa

ABSTRACT

This research was based on the importance of applying the principles of good governance in the management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) as village economic institutions that play an important role in improving community welfare and supporting village development. However, the management of BUMDes Karya Jaya in Karya Mandiri Village, Hulu Gurung Sub-District, Kapuas Hulu Regency still faces several problems, such as unstructured financial records, limited information disclosure, and low community participation in the management of the BUMDes. The purpose of this research is to analyze the implementation of good governance principles in the management of BUMDes Karya Jaya. This research used a descriptive method with a qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving the Village Head, the Head of BUMDes, the BUMDes Secretary, and members of the community as informants. The data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings show that the implementation of good governance principles in the management of BUMDes Karya Jaya has been carried out, but it has not been fully optimal. In terms of accountability, the management has prepared activity reports and financial reports. However, the financial records are still kept in a simple manner, there are non-performing loans in the savings and loan business unit, and the management of the 3 kg LPG business is not yet supported by clear contractual documents. In terms of transparency, information about the management and business development has not been shared regularly with the community. In terms of participation, community involvement in decision-making and supervision is still limited. Based on the findings, improvements in the governance of BUMDes are needed so that it can become more accountable, transparent, and participatory. Better governance is also expected to support business sustainability and improve the welfare of the village community.

Keywords: Good Governance, Accountability, Transparency, Participation, Village-Owned Enterprises

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPA BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Jaya di Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu." Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan desa. BUMDes Karya Jaya memiliki beberapa unit usaha, di antaranya usaha simpan pinjam dan distribusi LPG 3 kg. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti pencatatan keuangan yang belum terstruktur, adanya kredit macet pada unit usaha simpan pinjam, pengelolaan usaha LPG 3 kg yang belum didukung oleh dokumen perjanjian yang jelas, keterbukaan informasi yang masih terbatas, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan BUMDes belum berjalan secara optimal.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan BUMDes Karya Jaya di Desa Karya Mandiri. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip *good governance* yang meliputi akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan BUMDes Karya Jaya. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola BUMDes. Secara praktis, penelitian ini

diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah desa dan pengelola BUMDes dalam meningkatkan kualitas tata kelola BUMDes agar lebih akuntabel, transparan, dan partisipatif.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di Desa Karya Mandiri, Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu. Informan penelitian terdiri atas Kepala Desa, Ketua BUMDes, Sekretaris BUMDes, dan masyarakat Desa Karya Mandiri. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan BUMDes Karya Jaya telah dilaksanakan, namun belum berjalan secara optimal. Pada aspek akuntabilitas, pengurus BUMDes telah menyusun laporan kegiatan dan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah desa. Namun, pencatatan keuangan masih dilakukan secara sederhana dan belum menggunakan sistem pembukuan yang terstruktur. Selain itu, terdapat kredit macet pada unit usaha simpan pinjam yang berdampak pada perkembangan usaha BUMDes. Pengelolaan usaha LPG 3 kg juga belum didukung oleh dokumen perjanjian kerja sama yang jelas sehingga menimbulkan kelemahan dalam aspek pertanggungjawaban dan pengawasan usaha. Pada aspek transparansi, pengurus BUMDes telah menyampaikan informasi kepada pemerintah desa, namun penyampaian informasi mengenai perkembangan usaha dan kondisi keuangan kepada masyarakat belum dilakukan

secara rutin sehingga masih terdapat masyarakat yang kurang mengetahui perkembangan BUMDes. Pada aspek partisipasi, masyarakat telah dilibatkan dalam musyawarah desa yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDes, tetapi keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan BUMDes masih terbatas.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi telah diterapkan dalam pengelolaan BUMDes Karya Jaya, namun belum optimal. Oleh karena itu, pengelola BUMDes perlu meningkatkan kualitas pembukuan dan administrasi keuangan, menyelesaikan permasalahan kredit macet, memperjelas administrasi kerja sama usaha LPG 3 kg, meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta memperluas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan. Dengan demikian, penerapan prinsip *good governance* dapat berjalan lebih baik sehingga mampu mendukung keberlanjutan usaha BUMDes dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Karya Mandiri.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Nurkhaliza
Nomor Mahasiswa	: E1032221016
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis adalah hasil karya asli saya sendiri, bukan hasil karya orang lain dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di program studi, fakultas, atau perguruan tinggi lain. Selama pengetahuan saya, skripsi ini tidak memuat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali yang secara jelas dirujuk dalam daftar Pustaka di skripsi ini.

Pontianak, 11 Juni 2026

Saya membuat pernyataan



Nurkhaliza

NIM E1032221016

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Trust The Process

"Kesuksesan bukan tentang seberapa cepat selesai, tetapi seberapa besar kesungguhan dalam menjalaninya."

"Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga." (HR. Muslim)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kepada Allah SWT, yang senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan saya hingga sampai pada tahap perkuliahan. Saya mengucapkan rasa syukur atas segala nikmat, kemudahan, dan makna yang diberikan dalam setiap proses kehidupan, termasuk dalam penyusunan skripsi ini. Alhamdulillah, hingga detik ini Allah SWT selalu memberikan kelancaran, sehingga saya dapat menyelesaikan setiap tahapan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya bapak Syahdan. A dan mamak Nurwahidah byang selalu ada di setiap perjalanan hidup dan selalu mendukung setiap langkah yang saya ambil. Saya sanggat bersyukur memiliki kalian yang selalu memberi hal yang terbaik untuk kesuksesan saya dari segi materi mmaupun do'anya. Terima kasih kepada bapak dan mamak semoga kalian selau ada di setiap proses kehidupan saya, dan semoga Panjang umur untuk bapak dan mamak.

3. Kepada kedua abang dan kakak saya, Dedeh Hendra Wahidin dan Maulana Muhammad dan Almh. Karmila Sari, saya ucapkan terimakasih kepada abang-abang dan kakak yang saya sayangi yang menjadi penyemangat untuk bisa ada sampai di saat ini. Saya bersyukur memiliki kalian di dalam hidup ini, terima kasih selalu ada disisi saya didalam suka maupun duka. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kakak ipar, abang ipar, keponakan-keponakan, dan keluarga besar yang selalu menyemangati sampai bisa berada dititik ini.
4. Terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri, yang sudah sampai ditahap ini yang harus melewati suka maupun duka. Saya berterimakasih kepada diri saya sendiri Dimana sudah mampu melangkah sampai sejauh ini. Semoga saya dapat memanggakan dan sukses kedepannya untuk membahagiakan kedua orangtua saya dan saudara-saudara saya dapat membalas semua yang mereka kasih ke saya. Saya bersyukur bisa melewati semua peroses perkulihan hingga sampai di tahap penyusunan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Karya Mandiri, Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu" dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan dorongan berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca guna penyempurnaan karya ilmiah ini serta sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis maupun pembaca.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Herlan, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura.

2. Dr. Ira Patriani, S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Bima Sujendra, S.IP, M.Si selaku Koordinator Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Dr. Pardi, S.Sos., M.AB. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Deni Darmawan, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan saran, dorongan dan motivasi sehingga proses skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Dr. Isdairi, M.Si. selaku Dosen Penguji Utama yang telah memberikan saran, dorongan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Haunan Fachry Rohilie, S.I.P, M.A. selaku Dosen Penguji Pendamping yang telah memberikan saran, dorongan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Kepala Desa Karya Mandiri beserta seluruh staf kantor Desa Karya Mandiri dan masyarakat Desa Karya Mandiri yang telah bersedia memberikan data, informasi, serta dukungan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Bapak, ibu, abang-abang, Almh. Kakak, dan serta keluarga tercinta yang senantiasa memberikan do'a, dukungan, dan motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

10. Sahabat-sahabat penulis, yaitu Sandha, Ellen, Widi, Adel, Noven, dan Yunike, selama masa perkuliahan, serta teman-teman Angkatan 2022 Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan kebersamaan, semangat, dan dukungan kepada penulis.

Pontianak, 11 Juni 2026

Nurkhaliza
NIM E1032221016

DAFTAR ISI

halaman

ABSTRAK i
ABSTRACT ii
RINGKASAN SKRIPSI iii
PERNYATAAN KEASLIAN vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN vii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xii
DAFTAR TABEL xv
DAFTAR GAMBAR xvi
DAFTAR LAMPIRAN xvii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 7
1.3 Fokus Penelitian 7
1.4 Rumusan Masalah 8
1.5 Tujuan Penelitian 8
1.6 Manfaat Penelitian 8
1.6.1 Manfaat Teoritis 8
1.6.2 Manfaat Praktis 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10
2.1 Teori 10
2.1.1 *Governance* 10
2.1.2 *Good Governance* 12
2.1.3 Prinsip-Prinsip *Good Governance* 17
2.2 Hasil Penelitian Yang Relavan 18
2.3 Alur Pikir Penelitian 21
2.4 Pertanyaan Penelitian 25
BAB III METODE PENELITIAN 26
3.1 Jenis Penelitian 26

3.2 Langkah-Langkah Penelitian 27
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 30
3.3.1 Lokasi Penelitian 30
3.3.2 Waktu Penelitian 31
3.4 Subjek dan Objek Penelitian 32
3.4.1 Subjek Penelitian 32
3.4.2 Objek Penelitian 33
3.5 Teknik Pengumpulan Data 33
3.6 Alat Pengumpulan Data 35
3.7 Keabsahan Data 37
3.8 Teknik Analisis Data 39
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 42
4.1 Sejarah Desa Karya Mandiri 42
4.2 Kondisi Desa Karya Mandiri 44
4.2.1 Letak Wilayah 44
4.2.2 Luas Wilayah 45
4.3 Kelembagaan Desa 49
4.3.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa 49
4.3.2 Badan Usaha Milik Desa Karya Mandiri 51
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 56
5.1 Hasil Penelitian Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan BUMDes Desa Karya Mandiri 56
5.1.1 Akuntabilitas Dalam Pengelolaan BUMDes Desa Karya Mandiri 58
5.1.2 Trasparansi dalam pengelolaan BUMDes Desa Karya Mandiri 69
5.1.3 Partisipasi dalam Pengelolaan BUMDes Desa Karya Mandiri 74
5.2 Pembahasan Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan BUMDes Desa Karya Mandiri 78
5.2.1 Akuntabilitas Dalam Pengelolaan BUMDes Desa Karya Mandiri 79
5.2.2 Trasparansi dalam pengelolaan BUMDes Desa Karya Mandiri 82
5.2.3 Partisipasi dalam Pengelolaan BUMDes Desa Karya Mandiri 84
BAB VI PENUTUP 86

6.1 Simpulan 86
6.2 Saran 88
6.3 Keterbatasan Penelitian 90
DAFTAR PUSTAKA 92
LAMPIRAN-LAMPIRAM 95

DAFTAR TABEL

Tabel *halaman*

Tabel 1. 1 Nama BUMDes Yang Terdaftar Badan Hukum di Hulu Gurung 2

Tabel 1. 2 Perencanaan Unit Usaha BUMDes Desa Karya Mandiri 2021 3

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian 31

Tabel 4. 1 Nama-Nama Kepala Desa Karya Mandiri 44

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Desa Karya Mandiri Berdasarkan Dusun 46

Tabel 4. 3 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Karya Mandiri 47

Tabel 4. 4 Data Perangkat Desa Karya Mandiri 51

Tabel 4. 5 Data Pegurus BUMDes Karya Jaya Desa Karya Mandiri 54

Tabel 5. 1 Informan Penelitian 57

Tabel 5. 2 Perkembangan Unit Usaha LPG BUMDes Karya Mandiri 64

DAFTAR GAMBAR

Gambar *halaman*

Gambar 2. 1 Bagan Alur Pikir Penelitian..... 24

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Karya Mandiri..... 50

Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Jaya Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung..... 53

Gambar 5. 1 Dokumen dan Buku Pencatatan Keuangan BUMDes Karya Mandiri..... 61

Gambar 5. 2 Dokumen Catatan Tunggakan Pinjaman Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDes Karya Jaya. 63

Gambar 5. 3 Pangkalan LPG 3 Kg milik BUMDes Karya Jaya Desa Karya Mandiri yang berada di rumah pelaku usaha. 65

Gambar 5. 4 Aktivitas Distribusi, Penyimpanan, dan Penjualan LPG 3 Kg pada Unit Usaha LPG BUMDes Karya Jaya..... 66

Gambar 5. 5 Dokumentasi Musyawarah Perencanaa BUMDes Desa Karya Mandiri..... 72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran *halaman*

1. Pendoman wawancara Penelitian.....95
2. Pedoman Observasi.....98
3. Informan dalam Penelitian.....99
4. Dokumentasi Wawancara.....100
5. Dokumentasi Penelitian.....102
6. Surat Tugas Penelitian.....105
7. Biodata Penulis.....106

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat perekonomian desa adalah melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. BUMDes menjadi instrumen strategis dalam mengelola potensi lokal, meningkatkan pendapatan asli desa, serta membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat (Sofyani dkk. 2019).

Pendirian BUMDes memiliki landasan yuridis yang jelas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa Pasal 87 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan." Regulasi ini menunjukkan bahwa BUMDes bukan hanya wadah ekonomi desa, melainkan juga instrumen tata kelola pemerintahan desa dalam mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat (Ridlwan 2015). Penguatan tata kelola BUMDes yang transparan menjadi kunci utama agar lembaga ini mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi warga desa (Agunggunanto dkk. 2016).

BUMDes juga menuntut penerapan prinsip *good governance* dalam setiap tahap pengelolaannya. Hal ini meliputi akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengurus, transparansi dalam penyampaian informasi, dan serta partisipasi. Sejalan dengan pandangan (Dwiyanto, 2015), tata kelola pemerintahan yang baik akan terwujud apabila pemerintah mampu mengembangkan mekanisme yang

akuntabel, transparan, dan partisipatif dalam mengelola pelayanan publik maupun sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, keberhasilan BUMDes tidak hanya diukur dari aspek finansial semata, tetapi juga dari sejauh mana lembaga ini mampu mencerminkan praktik pemerintahan desa yang demokratis, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tabel 1. 1

Nama BUMDes Yang Terdaftar Badan Hukum di Hulu Gurung

No	Nama Desa	Nama Bumdes	Status
1	Nanga Tepuai	Buana Bhakti Tepuai	Sah Sebagai Badan Hukum
2	Landau Kumpang	Permata Endau	
3	Nanga Yen	Bhakti Jaya	
4	Lubuk Antuk	Uncak Piyabung	
5	Parang	Parang Jaya Berdikari	
6	Kelakar	Nibung Jaya	
7	Bugang	Anugrah Juju	
8	Mentawit	Karya Bersama	
9	Tani Makmur	Sri Rejeki	
10	Simpang Senara	Raja Embau	
11	Beringin	Beringin Jaya	
12	Sejahtera Mandiri	Pian Melalang	
13	Mubung	Karya Muda	
14	Tunas Muda	Bina Usaha	
15	Karya Mandiri	Karya Jaya	

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu

Berdasarkan daftar BUMDes Kabupaten Kapuas Hulu, BUMDes Desa Karya Mandiri telah terdaftar sebagai badan hukum dengan nama BUMDes Karya Jaya. BUMDes Karya Jaya merupakan yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Karya Mandiri sebagai wadah pengelolaan potensi desa secara produktif dan berkelanjutan. BUMDes ini didirikan pada tahun 2021 sebagai bagian dari upaya pemerintah desa dalam memperkuat tata kelola ekonomi lokal yang lebih mandiri

dan terstruktur, sehingga memiliki landasan kelembagaan yang kuat dalam mengembangkan kegiatan usaha desa.

Sebagai badan hukum BUMDes Karya Jaya memperoleh legitimasi formal untuk menjalankan aktivitas ekonomi dan sosialnya di tingkat desa. Pendirian BUMDes Karya Jaya pada tahun tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan pendapatan asli desa, membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan status kelembagaan yang jelas sejak awal pendiriannya, BUMDes Karya Jaya diharapkan mampu menjadi motor penggerak perekonomian desa sekaligus memperkuat kemandirian Desa Karya Mandiri dalam mendukung pembangunan yang berkesinambungan. Berikut ini perencanaan unit usaha milik Desa Karya Mandiri:

Tabel 1. 2

Perencanaan Unit Usaha BUMDes Desa Karya Mandiri 2021

No	Unit Usaha	Deskripsi Usaha	Kondisi
1.	Perdagangan	Menjual Gas LPG 3kg	Sedang Berjalan
2.	Peminjaman	Koprasi simpan pinjam uang	Tidak Berjalan

Sumber data: BUMDes Karya Jaya Desa Karya Mandiri 2025

Tabel diatas menjelaskan perencanaan unit usaha pada BUMDes Karya Jaya desa karya mandiri. BUMDes Karya Jaya yang dikelola Pemerintah Desa Karya Mandiri melalui unit usaha distribusi gas LPG 3 kg merupakan wujud implementasi kewenangan desa dalam mengelola potensi lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong kemandirian desa. Namun,

keberadaannya masih menghadapi kendala berupa kurangnya dukungan finansial dan keterbatasan infrastruktur yang berpengaruh langsung terhadap efektivitas operasional serta pengembangan usaha.

Pengelolaan BUMDes Karya Jaya di Desa Karya Mandiri, Kecamatan Hulu Gurung, prinsip akuntabilitas belum terlaksana secara optimal. Pelaporan keuangan BUMDes masih dilakukan secara sederhana, hanya dicatat dalam buku tanpa sistem pembukuan yang terstruktur sehingga menunjukkan lemahnya penerapan akuntabilitas publik. Pada unit usaha simpan pinjam juga ditemukan permasalahan berupa terjadinya kemacetan pembayaran karena sebagian warga termasuk aparat desa yang melakukan pinjaman tidak mengembalikan dana sesuai kesepakatan, sehingga mengganggu perputaran modal BUMDes. Selain itu, pada usaha gas LPG 3 kg terdapat praktik pengalihan pengelolaan kepada pelaku usaha tertentu tanpa adanya perjanjian resmi maupun dokumen pemindahan tanggung jawab, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban usaha.

Penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan BUMDes Karya Jaya masih menghadapi berbagai persoalan yang tidak sejalan dengan ketentuan dalam PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Pada pasal 19 ayat 2 mewajibkan BUMDes untuk menyusun laporan pertanggungjawaban tahunan yang memuat laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, serta permasalahan dan upaya penyelesaiannya. Namun pada praktiknya BUMDes Karya Jaya masih mencatat laporan keuangan secara sederhana di dalam buku

tanpa sistem pembukuan resmi, sehingga menunjukkan rendahnya akuntabilitas dalam tata kelola keuangan.

Pengelolaan BUMDes Karya Jaya di Desa Karya Mandiri, Kecamatan Hulu Gurung, prinsip transparansi belum sepenuhnya diterapkan secara efektif. Berdasarkan hasil pra-penelitian, diketahui bahwa dalam setiap kegiatan rapat yang membahas pengelolaan BUMDes, pihak pemerintah desa tidak melibatkan masyarakat secara langsung. Rapat hanya dilaksanakan dua kali dalam setahun dan umumnya dihadiri oleh aparat desa saja, tanpa memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat untuk mengetahui, menilai, ataupun memberikan masukan terhadap kegiatan dan penggunaan dana BUMDes. Dimana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 19 ayat 1 menegaskan kewajiban Direksi BUMDes untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada penasihat serta memastikan adanya keterbukaan informasi.

Rendahnya pelibatan masyarakat ini mencerminkan lemahnya partisipasi di mana warga tidak diberi kesempatan untuk memberikan masukan, mengawasi, atau berperan aktif dalam pengambilan keputusan. Hal ini tidak sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 7 ayat 2 yang mengamanatkan pelibatan masyarakat dalam kegiatan BUMDes. Kenyataannya, partisipasi sering kali hanya bersifat administratif tanpa substansi yang kuat (Fauzi 2021). Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara harapan bahwa BUMDes dikelola secara transparan dan partisipatif dengan kenyataan di lapangan.

Pengelolaan oleh elite desa sering kali menjadi penghambat utama, di mana kontrol penuh berada di tangan segelintir pengurus tanpa mekanisme pengawasan publik yang efektif (Zulkarnaen 2016). Padahal, dukungan dan kepercayaan masyarakat merupakan modal sosial krusial agar BUMDes dapat bertahan dan berkembang secara berkelanjutan (Sudaryana dan Yuningsih 2022). Tanpa ruang partisipasi yang nyata, BUMDes berisiko kehilangan relevansinya sebagai instrumen kesejahteraan warga desa.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Karya Mandiri. Sebagai lembaga ekonomi desa yang memiliki legitimasi hukum, BUMDes dituntut untuk dikelola secara transparan, akuntabel, dan partisipatif agar mampu menjadi motor penggerak perekonomian desa yang berkelanjutan. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas belum terlaksana secara optimal, ditandai dengan pelaporan keuangan yang masih sederhana dan belum terdokumentasi secara sistematis, unit usaha simpan pinjam mengalami kemacetan pembayaran, hingga usaha gas LPG 3kg di jalankan pelaku usaha tanpa adanya dokumen perjanjian yang jelas. Sementara itu, dari sisi transparansi, masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan maupun memperoleh akses informasi yang memadai terkait pengelolaan BUMDes.

Kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaan tersebut menimbulkan tantangan serius bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis sejauh mana

prinsip *good governance* diterapkan dalam pengelolaan BUMDes Karya Jaya serta memberikan rekomendasi bagi penguatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih akuntabel, transparan, dan partisipatif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Karya Mandiri, Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Rendahnya akuntabilitas pengurus dalam pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan kegiatan BUMDes.
2. Rendahnya transparansi tampak dari informasi pengelolaan BUMDes yang tidak terbuka karena rapat hanya melibatkan aparat desa tanpa kehadiran Masyarakat.
3. Minimnya partisipasi masyarakat terlihat dari tidak diberikannya ruang bagi warga untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan kegiatan BUMDes.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka fokus penelitian yang penulis ambil adalah mengenai penerapan prinsip Akuntabilitas, Trasparansi, dan Partisipasi dalam teori *good governance* pada pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Jaya di Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah penelitian yaitu Bagaimana penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Karya Mandiri, Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas, trasparansi, dan partisipasi dalam teori *good governance* pada pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Karya Mandiri Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, baik secara teoretis maupun praktis, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun mahasiswa dalam pengembangan pemikiran serta pemahaman terhadap permasalahan yang ada dalam pengelolaan BUMDes sebagai bagian dari kajian ilmu pemerintahan sekaligus memperdalam pemahaman mengenai prinsip *good governance* dalam tata kelola Badan Usaha Milik Desa

1.6.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah desa serta pihak-pihak terkait agar dapat meningkatkan tata kelola BUMDes dengan menerapkan prinsip *good governance.*

2. Bagi Badan Usaha Milik Desa Karya Mandiri sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan agar lebih baik sehingga BUMDes dapat berkembang dan maju.
3. Bagi mahasiswa dapat memberikan gambaran serta pengetahuan mengenai penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan BUMDes.